



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://epaper.dpr.go.id>

---

<b>Judul</b>	: Dukungan bank dunia percepat rehabilitasi
<b>Tanggal</b>	: Kamis, 17 Februari 2022
<b>Surat Kabar</b>	: Kompas
<b>Halaman</b>	: 6

### MANGROVE

#### Dukungan Bank Dunia Percepat Rehabilitasi

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia menginisiasi proyek mangrove untuk ketahanan daerah pesisir seluas 75.000 hektar di empat provinsi hingga 2026 guna mempercepat program rehabilitasi mangrove. Pengelolaan mangrove ini akan dilakukan dengan beberapa pola atau teknik rehabilitasi.

Direktur Jenderal Penge-  
lolaan Daerah Aliran Sungai  
dan Rehabilitasi Hutan Ke-  
menterian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan (KLHK) Dyah  
Murtiningsih menyampaikan,  
upaya mempercepat rehabi-  
litasi mangrove diwujudkan  
dengan dukungan berbagai pi-  
hak, termasuk Bank Dunia.  
Proyek yang akan dilakukan  
yakni Mangrove untuk Ke-  
tahanan Daerah Pesisir  
(Mangrove for Coastal Resi-  
lience Project).

"Proyek ini akan mereh-  
abilitasi mangrove seluas  
75.000 hektar. Selain itu, akan  
dilakukan juga program ke-  
giatan pengelolaan lanskap  
mangrove dan penguatan ke-  
bijakan serta kelembagaan  
mangrove nasional," ujar  
Dyah dalam acara konsultasi  
publik proyek mangrove un-  
tuk ketahanan daerah pesisir,  
Rabu (16/2/2022), di Jakarta.  
Menurut Dyah, proyek ini  
tidak hanya melibatkan peme-  
rintah pusat, tetapi juga pe-  
merintah daerah. Pelaksanaan  
proyek ini perlu pendekatan  
yang inklusif, partisipatif, dan  
tetap memperhatikan kondisi  
tanah sesuai dengan tipologi-  
nya.

Peran dan partisipasi ma-  
syarakat juga menjadi tujuan  
pengembangan proyek ini.  
Pemberdayaan masyarakat  
yang berdampak pada penam-  
bahana pendapatan melalui

usaha-usaha produktif berbasis ekosistem pada akhirnya akan mampu meningkatkan ketahanan atas ancaman perubahan iklim.

"Kapasitas masyarakat yang terlibat dalam proyek ini diharapkan dapat meningkat seiring dengan membaiknya ekosistem mangrove dan munculnya alternatif baru mata pencarian masyarakat. Pada prinsipnya, tujuan program ini ialah menstimulus masyarakat di tingkat tapak untuk menerima estafet pengelolaan mangrove ke depan," tuturnya.

Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Satyawan Pudyatmo-ko mengatakan, area potensial rehabilitasi mangrove untuk proyek ini mencapai 88.828 hektar (ha). Area initersebar di empat provinsi, yakni Sumatera Utara (11.083 ha), Riau (7.337 ha), Kalimantan Utara (28.767 ha), dan Kalimantan Timur (41.641 ha).

Berdasarkan tipologinya, area rehabilitasi ini terdiri dari lahan terbuka, mangrove kerapatan jarang dan sedang, mangrove terabrsi, serta tambak vegetasi. Setiap tipologi degradasi mangrove memiliki teknik rehabilitasi yang berbeda-beda karena gangguan pengelolaannya juga beragam. Rehabilitasi mangrove juga tidak bisa dilakukan dengan cara menanam dan ditinggal. Rehabilitasi mangrove harus diiringi dengan pemeliharaan selama 3-5 tahun sehingga tanaman tersebut sudah tegak dengan sempurna.

Hal terpenting lainnya agar rehabilitasi tidak sia-sia yaitu dengan memastikan siapa pihak yang mengelola, bagaimana pengelolaannya, dan terampilan apa yang dibutuhkan. Ketika mangrove tersebut sudah tumbuh, kegiatan yang dilakukan tidak sebatas menanam, tetapi juga memperkuat koordinasi pengelolaan lanskap dari tingkat kabupaten/kota hingga desa. "Tanpa melibatkan desa, jangan berharap restorasi dan rehabilitasi bisa berlanjut," tutur Satyawan. (MTK)